

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya. Penyuluhan pertanian berupaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran petani dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan pertanian merupakan suatu sistem pendidikan di luar sekolah atau non formal, bagi petani dan keluarganya agar berubah perilakunya untuk bertani lebih baik atau *better farming*, berusaha tani lebih menguntungkan atau *better bussines*, hidup lebih sejahtera atau *better living*, dan bermasyarakat lebih baik atau *better community* serta menjaga kelestarian lingkungannya atau *better environment* (Mardikanto, 2009). Penyuluhan Pertanian adalah pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik, sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, petani harus diajak belajar bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumber daya lingkungannya untuk kesejahteraannya yang lebih baik secara berkelanjutan.

Kegiatan usaha budidaya pertanian menuntut adanya perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta teknologi yang dapat diterapkan petani sebagai pelaku utama dalam sektor pertanian. Namun, masih banyak petani yang belum memahami teknik budidaya yang baik dan benar. Oleh karena itu, penyuluhan pertanian menjadi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Petani tidak hanya dituntut berubah pengetahuan, sikap dan keterampilannya, namun juga harus memutuskan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan inovasi serta menyesuaikan dengan kondisi lingkungan usahatannya (Arsyad, 2013).

Pada saat ini pelaksanaan penyuluhan pertanian tidak hanya dilakukan oleh penyuluh pertanian yang dibentuk pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), penyuluh swasta, lembaga keagamaan, dan petani yang berhasil dalam usahanya. Meskipun penyuluhan pertanian telah dilakukan oleh berbagai lembaga, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya koordinasi antar lembaga, keberagaman pada pelaksanaan penyuluhan dan terjadinya tumpang tindih program (Mardikanto, 2009).

Penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh berbagai lembaga menimbulkan keberagaman dalam pelaksanaan penyuluhan yang diterapkan oleh masing-masing pihak. Keberagaman yang dimaksud yaitu berkaitan dengan perencanaan penyuluhan pertanian, penerima manfaat penyuluhan pertanian, pemilihan materi penyuluhan yang dilakukan, penggunaan metode dan media penyuluhan serta keberagaman tujuan. Penyuluh yang dibentuk oleh pemerintah tentunya akan membawa inovasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah beserta materi, media dan metodenya. Penyuluh swasta atau LSM juga akan membawa inovasi yang tentunya berorientasi profit bagi penyandang dana atau pihak yang berkepentingan melalui kegiatan yang berupa penyuluhan kepada kelompok sasarannya (Mardikanto, 2009). Lembaga keagamaan juga melakukan proses penyuluhan dengan membawa inovasi yang sasarannya adalah kelompok komunitasnya. Petani yang berhasil dalam usahanya atau petani yang menjadi penyuluh swadaya juga melakukan penyuluhan kepada petani lain dengan membawa inovasi yang sudah dia terapkan dalam usaha taninya.

Keberagaman pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh atau agen perubahan pada dasarnya bertujuan agar petani berhasil mengadopsi inovasi yang dibawanya. Keberhasilan adopsi inovasi tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu karakteristik inovasi, karakteristik petani sebagai penerima, pengambilan keputusan adopsi, kualifikasi penyuluh dan media penyampaian inovasi, merupakan beberapa faktor yang mempunyai pengaruh kuat terhadap tingkat adopsi. Proses penyuluhan pertanian juga dipengaruhi oleh materi penyuluhan, metoda penyuluhan, perlengkapan penyuluhan dan pembiayaan penyuluhan (Mardikanto, 2009).

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai penyuluhan pertanian oleh lembaga berbeda. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Syahyuti (2014) yang menunjukkan bahwa

penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh penyuluh swadaya memiliki berbagai sisi keunggulan dibandingkan penyuluh pemerintah dan swasta, namun demikian, keberadaan ketiga jenis penyuluh ini mesti dapat disinergikan di lapangan dengan baik. Sinergi dimaksud setidaknya dalam hal materi penyuluhan, peran dalam subsistem agribisnis yang berbeda dari hulu ke hilir, dalam hal metode penyuluhan, serta dalam hal segmen petani yang menjadi sasaran. Penyuluh swadaya memiliki kelebihan dalam hal keterampilan dan praktek, pada subsistem pengolahan dan pemasaran, lebih piawai dalam metode demonstrasi dibandingkan teori, serta lebih memahami segmen petani yang paling dekat dengan dirinya secara sosial psikologis.

Tema pelaksanaan penyuluhan pertanian oleh lembaga berbeda sangat relevan dengan kondisi saat ini. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, petani perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing, daya saring dan daya sanding (Sumarjo, 2017). Oleh karena itu, penyuluhan pertanian yang efektif dan terkoordinasi antara lembaga berbeda sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, penyuluhan pertanian juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Beranjak dari kondisi tersebut, maka perlunya dilakukan penelitian bagaimana pelaksanaan penyuluhan pertanian itu berjalan sesuai dengan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga yang melakukan kegiatan penyuluhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi sementara diperoleh informasi bahwa pelaksanaan penyuluhan pertanian telah dilakukan oleh banyak pihak, antara lain penyuluh pertanian pemerintah atau penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga keagamaan dan petani yang berhasil dalam usahanya. Hasil pengamatan di Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai diperoleh informasi bahwa penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh penyuluh swadaya atau petani yang berhasil dalam usaha taninya kepada petani lain sebagai penerima manfaatnya, materi penyuluhan yang diberikan mudah diterapkan oleh petani lain yang menjadi penerima manfaatnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan petani lain yang menjadi penerima manfaatnya yang mendapatkan penyuluhan pertanian dari petani yang berhasil dalam usahanya.

Penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat kepada kelompok tani binaan juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kehadiran tinggi, materi penyuluhan mudah diterapkan oleh anggota dan memiliki jadwal pertemuan rutin. Penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh lembaga keagamaan menunjukkan partisipasi kehadiran peserta penyuluhan tinggi dan materi penyuluhan mudah diterapkan oleh anggotanya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari dokumentasi dalam pelaksanaan penyuluhan dilapangan serta kesepakatan bersama mengenai jadwal pertemuan yang telah ditentukan (*Gambar 1*).

Namun penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh penyuluh PNS dan THL justru mengindikasikan jika tidak ada kegiatan dari dinas maka penyuluhan pertanian jarang dilakukan, penyuluh pertanian hanya melakukan kunjungan ke kelompok tani diskusi dan mengambil dokumentasi, tetapi permasalahan yang dihadapi petani belum dapat dicarikan jalan keluarnya. Keadaan ini sesuai dengan laporan kegiatan penyuluh yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mentawai.

Pelaksanaan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh masing - masing lembaga memiliki cara sendiri - sendiri. Keadaan ini menarik untuk diteliti karena pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh masing - masing lembaga memiliki kekurangan dan kelebihan. Akibat yang terjadi dari pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh banyak pelaku penyuluhan adalah menjadi tidak efektif ketika penyuluh pertanian pemerintah menganjurkan penggunaan pestisida dan penyuluh lain menganjurkan pertanian organik, sehingga petani - petani binaan dari LSM terkesan anti dengan penggunaan pupuk kimia dan obat - obatan kimia. Dengan demikian rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan penyuluhan pertanian yang dilakukan empat lembaga?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penyuluhan pertanian yang dilakukan empat lembaga?
3. Bagaimanakah evaluasi penyuluhan pertanian yang dilakukan empat lembaga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Menganalisis bagaimana perencanaan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh empat lembaga.

2. Menganalisis bagaimana pelaksanaan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh empat lembaga.
3. Menganalisis bagaimana evaluasi penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh empat lembaga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu bahan rujukan dalam merencanakan program penyuluhan bagi penyuluh pertaniann pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan oleh peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji isu - isu yang berkaitan dengan studi pelaksanaan penyuluhan pertanian oleh banyak lembaga.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan.

